

Editor:

Prof.(Riset) Dr. Ir I Wayan Rusastra, M.S.

**DESENTRALISASI FISKAL
DAN PERSAINGAN USAHA**

Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah

Penulis:

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Achmad Sani Alhusain, S.E.,M.A.

Lisnawati S.Si.,M.S.E.

Mandala Harefa, S.E.,M.Si.

Ari Mulianta Ginting, S.E.,M.S.E.

Hilma Meilani, S.T.,MBA.

Dewi Restu Mangeswuri, S.E.,M.Si.

Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.

Judul:

DESENTRALISASI FISKAL DAN PERSAINGAN USAHA

Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

xvi + 220 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-5562-04-4

Cetakan Pertama, 2017

Penulis:

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Achmad Sani Alhusain, S.E.,M.A.

Lisnawati S.Si.,M.S.E.

Mandala Harefa, S.E.,M.Si.

Ari Mulianta Ginting, S.E.,M.S.E.

Hilma Meilani, S.T.,MBA.

Dewi Restu Mangeswuri, S.E.,M.Si.

Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.

Editor:

Prof.(Riset) Dr. Ir I Wayan Rusastra, M.S.

Desain Sampul:

Dino Sanggrha Irnanda

Tata Letak:

Nur Saadah

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bekerjasama dengan:

Inteligensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341- 573650 Fax. 0341-588010

www.intranspublishing.com

Dicetak oleh:

PT Publica Media Utama

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Buku bunga rampai dengan tema utama Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha: Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah, dinilai relevan dan kontekstual dengan arah dan gerakan pembangunan nasional. Saat ini pemerintah memberikan penekanan pada pertumbuhan berkualitas dengan focus pada pemerataan pembangunan dengan memberikan prioritas pada akselerasi pembangunan daerah dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Buku terdiri atas tiga sub-tema yaitu (a) Peran perbankan, pemberdayaan UMKM, dan optimalisasi dana CSR; (b) Kondisi perpajakan nasional, desentralisasi fiskal, dan efektivitas pajak daerah; dan (c) Kebijakan persaingan usaha dan pengembangan ekonomi ketenagakerjaan. Ketiga sub-tema ini dinilai memiliki konektivitas yang baik dalam mendukung perekonomian daerah melalui implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan penciptaan persaingan

usaha yang sehat. Keberhasilan pembangunan perekonomian daerah akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Perbankan berperan penting sebagai sumber pendanaan dan memperlancar transaksi pembayaran di daerah. Penjaminan pendanaan merupakan syarat keharusan dalam pemecahan masalah pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM. Optimalisasi pengelolaan dana CSR akan berperan penting dalam pengembangan UMKM dan pembangunan perekonomian daerah. Dilain pihak perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan mengalami tantangan kepatuhan wajib pajak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan program tax amnesty menjadi tumpuan sumber pendanaan. Desentralisasi kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan pusat, dan juga memperhitungkan efektivitas dan tantangan dalam implementasinya, serta dampak dan kontribusinya terhadap PAD dan kemandirian keuangan daerah. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah adalah keberhasilan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industry yang pada akhirnya akan berkontribusi nyata terhadap perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di daerah dan agregat nasional.

Dalam perspektif kedepan, sedikitnya terdapat empat aspek yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan antisipasi implementasinya, yaitu: (a) Optimalisasi dan harmonisasi peran sentral perbankan dan dana CSR dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian daerah; (b) Optimalisasi dan harmonisasi sektor perpajakan, desentralisasi fiskal, dan efektifitas pajak daerah dalam perspektif kemandirian keuangan dan perekonomian daerah; (c) Pemantapan kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam rangka mendorong perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing industry, khususnya UMKM dan perekonomian daerah; dan (d) Pada akhirnya adalah optimalisasi dan harmonisasi dari ketiga aspek strategis ini dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah yang didedikasikan untuk mencapai pemerataan perekonomian nasional sebagai prioritas nasional saat ini.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada para peneliti yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) pendukung buku ini. Kesembilan KTI secara integratif mendukung sub-tema yang telah ditetapkan,

dan pada akhirnya mendukung tema utama penguatan sektor keuangan dan pengembangan industry (khususnya UMKM) mendukung perekonomian daerah. Kepada Prof. Dr. I Wayan Rusastra, APU dari Forum Komunikasi Profesor Riset (FKPR) Kementerian Pertanian disampaikan penghargaan mendalam atas dedikasinya membangun struktur, memberikan saran substantif, dan koreksi editorial sehingga buku ini layak untuk diterbitkan dan disimak pembaca. Semoga invensi dan inovasi yang dituangkan dalam buku ini berkontribusi positif dalam memantapkan pemerataan perekonomian nasional melalui akselerasi perluasan dan pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya UMKM.

Selamat Membaca.

Kepala Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., MSi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xv
Prolog.....	1

TOPIK I: PERAN PERBANKAN, PEMBERDAYAAN UMKM, DAN OPTIMALISASI DANA CSR	6
---	----------

BAGIAN PERTAMA: PERAN PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI: SUMBER PENDANAAN DAN MEMPERLANCAR TRANSAKSI PEMBAYARAN

(Sony Hendra Permana)	7
I. Pendahuluan	7
II. Peran, Fungsi dan Kegiatan Usaha Perbankan	11
2.1. Pengertian dan Fungsi Usaha Perbankan	11
2.2. Jenis Bank dan Kegiatan Usaha Perbankan	14
III. Perbankan Sebagai Sumber Pendanaan Bagi Pembangunan Daerah	16
IV. Perbankan Memperlancar Transaksi Pembayaran di Daerah	21
V. Penutup	23
Daftar Pustaka.....	24

BAGIAN KEDUA: PEMBERDAYAAN UMKM DAN PEREKONOMIAN NASIONAL: PERSPEKTIF PENJAMINAN

(Ariesy Tri Mauleny)	27
I. Pendahuluan	27
II. Dinamika dan Tantangan Perekonomian Nasional	30

2.1. Dinamika Konsepsi Perekonomian Nasional	30
2.2. Perkembangan Perekonomian Nasional	32
2.3. Tantangan Perekonomian Nasional	37
III. Konsepsi, Perkembangan dan Strategi Pemberdayaan UMKM	38
3.1. Konsepsi dan Karakteristik UMKM	38
3.2. Perkembangan dan Permasalahan UMKM	39
(1) Perkembangan dan Kontribusi UMKM	39
(2) Kendala Pengembangan UMKM	42
3.3. Strategi Pemberdayaan UMKM	44
IV. Penjaminan Syarat Keharusan Solusi Pembiayaan UMKM	46
4.1. Konsepsi dan Bentuk Penjaminan	46
4.2. Mekanisme Penyelenggaraan Penjaminan	47
4.3. Penjaminan UMKM di Provinsi DI Yogyakarta	49
V. Penutup	53
Daftar Pustaka	54

BAGIAN KETIGA: OPTIMALISASI DANA DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM CSR: POLA KEMITRAAN DAN DUKUNGAN REGULASI DALAM PENGEMBANGAN UKM DAERAH

(Achmad Sani Alhusain)	56
I. Pendahuluan	56
II. Konsep dan Optimalisasi CSR	58
2.1. Konsep CSR	58
2.2. Optimalisasi CSR	60
III. Pengelolaan CSR di Jawa Barat dan Bali	64
3.1. Pola Optimal Pengelolaan Dana CSR di Jawa Barat	64
(1) Pola Kemitraan Strategis dan Dukungan Regulasi	64
(2) Mekanisme Penentuan dan Program Utama CSR	66
(3) Program Sosial Budaya dan Perekonomian lainnya	71
3.2. Pola Quasi Optimal Pengelolaan Dana CSR di Bali	72
(1) Peran strategis dan Dukungan Regulasi UMKM	72
(2) Program Kemitraan UMKM dalam Pengentasan Kemiskinan	73

IV. Optimalisasi Dana dan Keberlanjutan Progran CSR	74
4.1. Konsepsi Implementasi dan Keberlanjutan Program CSR	74
4.2. Model Pola dan Keberlanjutan Program CSR	75
4.3. Integrasi dan Sinergi Program CSR dalam Pengentasan Kemiskinan	77
V. Penutup	78
Daftar Pustaka	79

TOPIK 2: KONDISI PERPAJAKAN NASIONAL, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH 82

BAGIAN PERTAMA: KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN TAX AMNESTY (Lisnawati) 83

I. Pendahuluan	83
II. Kondisi Perpajakan di Indonesia	85
2.1. Kepatuhan Wajib Pajak	85
2.2. Administrasi Perpajakan	86
III. Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia	87
3.1. Konsep Dasar Tax Amnesty	87
3.2. Perkembangan Tax Amnesty	90
3.3. Pasca Program Tax Amnesty	94
IV. Penutup	95
Daftar Pustaka	96

BAGIAN KEDUA: DESENTRALISASI KEBIJAKAN FISKAL: DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH (Mandala Harefa) 98

I. Pendahuluan	98
II. Kondisi Umum Penerimaan Pemerintah Daerah	102
III. Pelimpahan Kewenangan dalam Kebijakan Desentralisasi	105
IV. Dampak Pengalihan PBB terhadap Keuangan Pusat	109
V. Studi Kasus Pemda Kota Balikpapan	111
5.1. Kondisi Umum Keuangan Daerah	111
5.2. Tantangan Implementasi Pengalihan PBB-P2	116

VI. Evaluasi Kebijakan Pengalihan Pajak PBB-P2	118
VII. Penutup	121
Daftar Pustaka.....	122

BAGIAN KETIGA: DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: KASUS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA (Ari Mulianta Ginting)

I. Pendahuluan	125
II. Regulasi dan Kebijakan Desentralisasi Fiskal	127
III. Kondisi Kemandirian Keuangan Daerah.....	130
IV. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	133
4.1. Tujuan Utama Desentralisasi Fiskal	133
4.2. Dampak Dana Desentralisasi Fiskal	134
4.3. Kendala Kemandirian dan Keuangan Daerah	136
V. Penutup	138
Daftar Pustaka.....	139

BAGIAN KEEMPAT: EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 (Hilma Meilani)

I. Pendahuluan	141
II. Kerangka Konseptual Keuangan Daerah	144
2.1. Pendapatan asli Daerah (PAD)	144
2.2. Pengertian dan Penggolongan Pajak Daerah	145
2.3. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah	148
III. Kondisi Umum Keuangan Daerah Kabupaten Badung.....	149
3.1. Perkembangan Penerimaan PAD	149
3.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah	151
IV. Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya terhadap PAD	154
4.1. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	154
4.2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	156
V. Penutup	158
Daftar Pustaka.....	159

TOPIK 3: KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KETENAGAKERJAAN 161

BAGIAN PERTAMA: KEBIJAKAN DAN REGULASI PERSAINGAN USAHA: PERILAKU ANTIPERSAINGAN DAN PERAN LEMBAGA PENGAWAS (Dewi Restu Mangeswuri) 162

I. Pendahuluan	162
II. Arah dan Kebijakan dan Regulasi Persaingan Usaha di Indonesia ...	164
2.1. Arah Kebijakan Persaingan Usaha	164
2.2. Regulasi Persaingan Usaha	166
III. Perilaku Perusahaan yang Bersifat Antipersaingan	170
IV. Peran Kebijakan dan Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha	170
V. Penutup	173
Daftar Pustaka.....	173

BAGIAN KEDUA: EKONOMI KETENAGAKERJAAN NASIONAL: ISU AKTUAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA (Juli Panglima Saragih) 176

I. Pendahuluan	176
II. Profil Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Indonesia	177
III. Isu Aktual Ketenagakerjaan di Indonesia	181
3.1. Tenaga Kerja Alih Daya (Out Sourcing)	181
3.2. Tingkat Upah dan Sistem Pengupahan	181
3.3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	186
3.4. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal	187
3.5. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	187
3.6. Penatalaksana Rumah Tangga (Pekerja Pembantu Rumah Tangga)	188
3.7. Tenaga Kerja Asing	189
IV. Strategi Pengembangan Ketenagakerjaan di Indonesia	190
4.1. Peningkatan Kualitas SDM	191
4.2. Pengangguran dan Peningkatan Potensi Ketenagakerjaan	193
4.3. Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	196

V. Penutup	198
Daftar Pustaka	199
Epilog	201
Indeks	206
Biografi Penulis	213
Biografi Editor	218

DAFTAR TABEL

TOPIK I: PERAN PERBANKAN, PEMBERDAYAAN UMKM, DAN OPTIMALISASI DANA CSR 6

BAGIAN PERTAMA: PERAN PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI: SUMBER PENDANAAN DAN MEMPERLANCAR TRANSAKSI PEMBAYARAN 7

Tabel 1. Kinerja Perbankan Indonesia 2012-2016 9

Tabel 2. Data Penyaluran Kredit Perbankan ke Sektor UMKM Menurut Jenis Penggunaan, 2012-2016 18

Tabel 3. Data Kredit Bank Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank berdasarkan Lokasi Bank Penyalur Kredit pada 10 Provinsi Terbesar 2012-2016 19

Tabel 4. Perkembangan Transaksi Sistem Pembayaran di Indonesia, 2012-2016 22

BAGIAN KEDUA: PEMBERDAYAAN UMKM DAN PEREKONOMIAN NASIONAL: PENJAMINAN PEMBIAYAAN DALAM Mendukung Pembangunan Ekonomi 24

Tabel 1. PDB menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia, 2010-2014 33

Tabel 2. Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini di Indonesia, 2010-2015 36

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Usaha Tidak Berbadan Hukum Berdasarkan Lapangan Usaha di Indonesia, 2000-2004 48

BAGIAN KETIGA: OPTIMALISASI DANA DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM CSR: POLA KEMITRAAN DAN Dukungan Regulasi dalam Pengembangan UKM Daerah 56

Tabel 1. Kegiatan Pembangunan yang Didanai CSR di Jawa Barat 69

TOPIK 2: KONDISI PERPAJAKAN NASIONAL, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH 82

BAGIAN PERTAMA: KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PERSPEKTIF KEBIJAKAN TAX AMNESTY 83

Tabel 1. Sejarah Pengampunan Pajak di Indonesia 1964-2008 91

BAGIAN KEDUA: DESENTRALISASI KEBIJAKAN FISKAL: DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH 98

Tabel 1. Implikasi Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB-P2 terhadap Penerimaan APBN, 2010-2014 110

Tabel 2. Realisasi dan prediksi pendapatan Daerah dalam APBD Kota Balikpapan Tahun 2011-2013 113

Tabel 3. Perkembangan Target Pajak Daerah dan PAD Kota Balikpapan Tahun 2012-2014 115

Tabel 4. Perkembangan Realisasi Pajak Daerah (Lima Jenis Pajak Daerah) dan PAD Tahun 2012-2014 115

BAGIAN KETIGA: DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: KASUS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA 125

Tabel 1. Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara, 2012-2016 132

Tabel 2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 133

Tabel 3. Hasil Pengujian *Granger Causality Test* 134

Tabel 4. Hasil Analisa Regresi Panel Pengaruh Dana Desentralisasi Terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara, 2012-2016 135

BAGIAN KEEMPAT: EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PAD SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN

2009 141

Tabel 1. Perbandingan Jenis Pajak dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 142

Tabel 2. Kriteria Pedoman Penilaian Efektivitas Kinerja Keuangan	148
Tabel 3. Interpretasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	149
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008-2015	150
Tabel 5. Laju Pertumbuhan pada Kabupaten Badung Tahun 2009-2015	151
Tabel 6. Perkembangna Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008-2015	152
Tabel 7. Realisasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008-2015	152
Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pajak Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008-2015	155
Tabel 9. Kontribusi Pajak Daerah terhadap pad Kabupaten Badung Tahun 2008-2015	155

DAFTAR GAMBAR

TOPIK I: PERAN PERBANKAN, PEMBERDAYAAN UMKM, DAN OPTIMALISASI DANA CSR 6

BAGIAN PERTAMA: PERAN PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI: SUMBER PENDANAAN DAN MEMPERLANCAR TRANSAKSI PEMBAYARAN 7

Gambar 1. Komposisi Aset Industri Jasa Keuangan di Indonesia Juni 2017 10

BAGIAN KEDUA : PEMBERDAYAAN UMKM DAN PEREKONOMIAN NASIONAL: PENJAMINAN PEMBIAYAAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI 24

Gambar 1. Produk Domestik Bruto dan Pendapatan Nasional di Indonesia, 2008-2014 34

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil menurut Provinsi di Indonesia, 2013-2015 41

Gambar 3. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil menurut Provinsi di Indonesia, 2013-2015 42

Gambar 4. Indeks Produksi UMKM menurut Provinsi di Indonesia, 2011-2017 44

Gambar 5. Penyaluran Kredit UMKM oleh Perbankan di Indonesia, 2012-2016 45

Gambar 6. Kredit UMKM Berdasarkan Klasifikasi Usaha dan Penggunaandi D.I. Yogyakarta, 2013 50

Gambar 7. Kredit UMKM Menurut Kelompok Bank dan Sektor Ekonomidi D.I. Yogyakarta, 2013 51

TOPIK 2: KONDISI PERPAJAKAN NASIONAL, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH 82

BAGIAN KEDUA: DESENTRALISASI KEBIJAKAN FISKAL: DAMPAKNYA TERHADAP KEUANGAN PUSAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI DAERAH 98

Gambar 1. Perkembangan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2008-2014 103

Gambar 2. Pendapatan Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2007-2013 104

BAGIAN KETIGA: DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH: KASUS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA 125

Gambar 1. Perkembangan DAU Kepada Pemerintah Daerah, 2004-2016 129

Gambar 2. Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2016 131

TOPIK 3: KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KETENAGAKERJAAN 161

BAGIAN KEDUA: EKONOMI KETENAGAKERJAAN NASIONAL: ISU AKTUAL DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA 176

Gambar 1. Tingkat Pengangguran di Indonesia (1986-2017) 192

PROLOG

Buku dengan judul Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha: Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah, dilatarbelakangi oleh harapan mengedepankan pemerataan ekonomi nasional melalui percepatan perluasan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Ketiga sub-tema yang diusung dalam buku ini, yang dirancang secara integratif dalam mendukung judul (tema utama), secara naratif adalah: (a) Sub-tema pertama, Optimalisasi peran perbankan dan dana CSR dalam pemberdayaan UMKM sebagai wahana strategis dalam membangun pemerataan perekonomian nasional; (b) Sub-tema kedua, Optimalisasi system dan penguatan perpajakan nasional (melalui program tax amnesty), desentralisasi fiskal, dan efektivitas pajak daerah, sebagai sumber pendanaan pembangunan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang diabdikan untuk memperkuat pemerataan perekonomian nasional; dan (c) Sub-tema ketiga, Membangun sinergi dan saling melengkapi dalam implementasi kebijakan persaingan usaha dan pengembangan ekonomi ketenagakerjaan, melalui eliminasi perilaku perusahaan yang bersifat antipersaingan sehingga dapat diciptakan perluasan kesempatan berusaha dan bekerja di tingkat daeran dan nasional.

Justifikasi dan urgensi yang melatarbelakangi optimalisasi peran perbankan, pemberdayaan UMKM, dan dana CSR (Sub-Tema I) adalah: *Petama*, Industri jasa keuangan, khususnya perbankan, merupakan salah satu sektor industry yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian daerah dan

nasional. Beberapa jasa lembaga perbankan diantaranya sebagai lembaga intermediasi keuangan, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran, dan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran dunia perbankan yang strategis tersebut akan berkontribusi positif dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di daerah.

Kedua, Alokasi sumberdaya ekonomi belum berpihak pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya UMKM. UMKM yang terbukti tangguh menghadapi krisis ekonomi regional/global menghadapi sejumlah tantangan seperti kesulitan akses permodalan, keterbatasan kapasitas SDM, kendala pemasaran, dan kebijakan terkait kepastian dan perlindungan usaha. Kebanyakan UMKM termasuk dalam katagori sektor informal sehingga tidak memiliki badan hukum dan kecakapan administrasi keuangan sehingga mengalami kesulitan untuk dapat mengakses sejumlah kebijakan dan program pemberdayaan yang disediakan pemerintah. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diluncurkan regulasi yang memberikan jaminan bagi UMKM dalam memperoleh kemudahan akses pembiayaan sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah menuju perekonomian nasional yang lebih merata dan berkeadilan.

Ketiga, Dalam mendukung pengembangan UMKM dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. CSR merupakan bentuk peran serta kalangan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Walaupun pengelolaan dana CSR merupakan otoritas dunia usaha, namun perlu dibangun sinerginya dengan program pemerintah sehingga akan diperoleh manfaat dan dampak yang maksimal bagi masyarakat luas. Potensi CSR yang relatif besar dapat menjadi sumber pendanaan non-pemerintah dan dalam implementasinya perlu dibangun sinerginya dengan program pembangunan daerah, khususnya pengembangan UMKM. Sinergi ini dinilai penting dalam perspektif optimalisasi dana dan keberlanjutan program CSR, dengan mempertimbangkan pola kemitraan dan dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM daerah.

Sub-Tema II, Kondisi perpajakan nasional, desentralisasi fiskal dan efektifitas pajak daerah, dilatarbelakangi oleh justifikasi dan peran penting, yaitu: *Pertama*, Perpajakan nasional dihadapkan pada permasalahan maraknya praktik penghindaran dan pengelakan pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam

peraturan perpajakan. Konsekuensinya adalah rendahnya penerimaan pajak, dimana dalam sepuluh tahun terakhir ini realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui perluasan fiskal, salah satunya sebagai langkah awal adalah pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Sasaran pengampunan pajak adalah untuk pencapaian target penerimaan pajak, peningkatan likuiditas sektor keuangan, dan sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan administrasi perpajakan; *Kedua*, Kebijakan desentralisasi fiskal, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, merupakan pelimpahan pengelolaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah. Revisi terbaru dan dinilai signifikan adalah pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Dalam konteks ini penting untuk diketahui dampak pengalihan PBB-P2 terhadap keuangan pusat, tantangan implementasinya di daerah, kontribusinya terhadap kemandirian keuangan daerah, dan perspektif kebijakan dalam mendukung keberhasilan pengalihan kewenangan ini;

Sub-Tema II ini juga dilatarbelakangi oleh dua kenyataan berikut, yaitu: *Ketiga*, Desentralisasi dan kewenangan fiskal kepada daerah otonom diasumsikan akan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi alokasi sumberdaya, karena pemda lebih dekat dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Desentralisasi akan mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat serta pemerataan hasil pembangunan. Desentralisasi fiskal juga memiliki keunggulan seperti program pembangunan akan sesuai dengan kepentingan local dan lingkungan setempat, meningkatkan system administrasi daerah, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kesemuanya ini akan berkontribusi positif terhadap kemandirian keuangan dan pemerintahan di daerah. *Keempat*, Semangat UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, dimana provinsi diberikan akses terhadap lima jenis pajak dan kabupaten/kota sebelas jenis pajak (termasuk PBB-P2). Penambahan jenis pajak, perluasan basis pajak, dan keleluasaan penetapan tariff diharapkan berkontribusi positif terhadap kepentingan investasi, pengembangan infrastruktur, dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam memikul bersama beban pembangunan daerah. Dalam konteks ini penting untuk diketahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan setelah implementasi UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

Beberapa aspek yang melatarbelakangi Sub-Tema III, Kebijakan persaingan usaha dan pengembangan ekonomi ketenagakerjaan, adalah: *Pertama*, Pemusatan kekuatan ekonomi atau penguasaan sumberdaya ekonomi pada sekelompok masyarakat tertentu dalam bentuk monopoli dan oligopoly telah menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan social ekonomi. Penciptaan iklim usaha yang adil dan kompetitif memegang peranan penting dan strategis. Dua komponen utama persaingan usaha yang kompetitif adalah terciptanya persaingan usaha yang sehat dan penegakan hukum persaingan usaha yang efektif. Basis regulasinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mengedepankan semangat demokrasi ekonomi Pancasila sebagai dasar politik ekonomi nasional. Dalam konteks pengembangan kerjasama ekonomi kawasan regional ASEAN, maka kebijakan persaingan usaha yang kondusif ditingkat domestic harus dikomplemen dengan kebijakan yang sama di tingkat kawasan.

Kedua, Pengembangan ekonomi ketenagakerjaan menghadapi tantangan yang relatif kompleks yang mencakup aspek hubungan industrial ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan pekerja, perbaikan potensi dan kapasitas tenaga kerja yang kesemuanya akan berdampak terhadap keberlanjutan usaha dan perekonomian nasional. Perusahaan dan asosiasi pekerja dengan fasilitasi pemerintah melalui hubungan industrial yang sehat harus mengedepankan dialog pada setiap penyelesaian permasalahan yang ada demi keberlanjutan perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Perlu disadar bahwa tantangan kedepan akan lebih berat, khususnya terkait dengan implementasi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang membutuhkan kesiapan untuk bersaing dengan terbukanya peluang masuknya tenaga kerja asing; (c) Berkenaan dengan tantangan ekonomi ketenagakerjaan yang kompleks dan menantang, maka peran penciptaan dan penegakan hukum persaingan usaha yang kompetitif dinilai sangat strategis dalam upaya peningkatan daya saing (produktivitas dan efisiensi) industry di dalam negeri. Peningkatan daya saing industry diharapkan akan berkontribusi positif dalam perluasan kesempatan berusaha dan bekerja di Indonesia.

Nampak jelas bahwa optimalisasi dan harmonisasi terkait dengan ketersediaan dan akses pendanaan, pemantapan desentralisasi fiskal, dan penguatan efektivitas pajak daerah didukung oleh penciptaan dan penegakan hukum persaingan usaha yang kompetitif akan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Secara khusus optimalisasi dan harmonisasi kebijakan

ini akan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan UMKM dan percepatan serta perluasan perekonomian daeran sehingga akan berkontribusi nyata dalam mendukung pemerataan perekonomian nasional yang menjadi prioritas pembangunan dewasa ini.

Jakarta, September 2017

Editor

EPILOG

Buku dengan judul *Desentralisasi Fiskal dan Persaingan Usaha: Kebijakan Pendukung Perekonomian Daerah*, memiliki tujuan perumusan kebijakan optimalisasi instrument kebijakan sektor keuangan dan persaingan usaha dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Buku terdiri atas tiga sub-tema dengan sekuensi dan konektivitas yang dirancang untuk mendukung kemandirian keuangan daerah serta mendorong akselerasi perluasan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Sub-Tema I, diarahkan untuk pencapaian sasaran optimalisasi dan harmonisasi sektor perbankan dan dana CSR dalam mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian daerah. Sub-tema ini didukung oleh tiga karya tulis ilmiah (KTI), *Pertama*, Peran perbankan dalam pengembangan ekonomi: Sumber pendanaan dan memperlancar transaksi pembayaran. Dalam analisisnya, **Sony Hendra Permana** mengemukakan bahwa perbankan merupakan lembaga jasa keuangan yang memegang peranan penting bagi perekonomian daerah dan nasional. Bagi perekonomian daerah, perbankan memiliki peran ganda terkait dengan peningkatan akses keuangan, kemudahan transaksi pembayaran, dan sumber pendanaan bagi daerah, khususnya dalam pengembangan UMKM. Perkembangan teknologi informasi (khususnya internet) berdampak sangat besar dalam peningkatan jasa perbankan yang cepat, aman, efisien dan

handal dalam memfasilitasi perluasan pasar dan transaksi perdagangan sehingga meningkatkan perekonomian UMKM di daerah. Dalam perspektif kedepan, dibutuhkan kondisi persaingan usaha perbankan yang sehat dan edukasi perbankan kepada masyarakat dalam rangka menyediakan layanan jasa transaksi non-tunai yang aman, cepat, efisien dan handal.

Kedua, **Ariesy Tri Mauleny** dalam KTI-nya, Perberdayaan UMKM dan perekonomian nasional: Penjaminan pembiayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi, mengemukakan beberapa temuan menarik. Dinyatakan bahwa UMKM mempunyai peran strategis dalam menggerakkan perekonomian di daerah dan secara nasional. UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB, kesempatan kerja, dan memiliki ketangguhan menghadapi goncangan ekonomi eksternal, namun secara inheren memiliki sejumlah kendala dan keterbatasan. Dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian dan pemerataan pendapatan dibutuhkan reorientasi pemberdayaan UMKM dengan memprioritaskan pengembangan skala usaha, perluasan akses pembiayaan, dan kemampuan penetrasi pasar. Terkait dengan peningkatan akses jasa keuangan dibutuhkan dukungan penjaminan pembiayaan dan pendampingan terhadap UMKM melalui kerjasama pemerintah daerah, lembaga penjaminan dan sektor perbankan.

Ketiga, dalam KTI berjudul, Optimalisasi dana dan keberlanjutan program CSR: Pola kemitraan dan dukungan regulasi dalam pengembangan UMKM daerah, **Achmad Sani Alhusain** mengemukakan bahwa Jawa Barat dan Bali telah memiliki mekanisme pengelolaan dana CSR BUMN dan BUMD yang dintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah, dengan sasaran untuk mengoptimalkan dana CSR dalam mendukung perekonomian di daerah. Implementasi program dan kegiatan pembangunan terkait dengan pemanfaatan dana CSR di Jawa Barat dinilai sudah terkait langsung dengan pengembangan UMKM di daerah. Di Bali pemanfaatan dana CSR lebih diprioritaskan kepada program dan kegiatan pengentasan kemiskinan (misalnya program bedah rumah), walaupun pengembangan UMKM merupakan program pembangunan pemda Bali. Dalam perspektif optimalisasi dana CSR, perlu dilakukan evaluasi tingkat efektivitas, keberlanjutan program, dan sinkronisasi kegiatan serta integrasinya dengan program pembangunan daerah dan nasional.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Sub-Tema II adalah optimalisasi dan harmonisasi sektor perpajakan, desentralisasi fiskal, dan efektivitas pajak daerah

dalam perspektif pencapaian kemandirian keuangan dan perekonomian daerah. Sub-tema ini didukung oleh empat karyatulis ilmiah, *Pertama*, Kondisi perpajakan di Indonesia: Kepatuhan wajib pajak dan perspektif program tax amnesty. Dalam analisisnya **Lisnawati** menyatakan bahwa kebijakan pengampunan pajak harus mampu mereorientasi pola pikir kepatuhan wajib pajak tidak sekedar *ability to pay*, tetapi dikomplemen dan dibangun atas basis *willingness to pay*. Kebijakan tax amnesty diharapkan membawa semangat dan kesadaran baru bahwa pajak bukan pemaksaan Negara kepada masyarakat, tetapi penyempurnaan peraturan atau ketentuan yang dapat membangkitkan kepatuhan wajib pajak secara rasional dan berkelanjutan. Konsekuensinya adalah reformasi perpajakan harus diikuti dengan system perpajakan yang lebih berkeadilan dan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

Kedua, **Mandala Harefa** dalam makalahnya, Desentralisasi kebijakan fiskal: Dampaknya terhadap keuangan pusat dan tantangan implementasinya di daerah, mengemukakan informasi yang dapat dipertimbangkan sebagai opsi perumusan kebijakan. Implementasi penyerahan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah menghadapi tantangan validitas dan akurasi database objek pajak, sehingga mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak daerah. Disamping itu Pemda menghadapi sejumlah kendala teknis yang mencakup kapasitas SDM, regulasi dan kelembagaan. Beberapa pemantapan perencanaan dan pelaksanaan yang dibutuhkan diantaranya adalah aspek pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan, serta pelatihan terkait pemahaman standar system keuangan. Kesemuanya ini merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemda terhadap wajib pajak, pengelolaan hasil penerimaan pajak agar dimanfaatkan secara maksimal, transparan dan akuntabel dalam meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah.

Ketiga, Desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah: Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, oleh **Ary Mulianta Ginting** menyimpulkan bahwa dana desentralisasi fiskal seharusnya dipakai untuk memacu peningkatan kapasitas kemandirian keuangan daerah. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota (kasus Sumatera Utara) termasuk dalam katagori rendah sekali dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan hanya sebesar 7,07 persen. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan dana desentralisasi secara signifikan berpengaruh negatif

terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dibutuhkan kreatifitas pemerintah daerah dalam peningkatan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber penerimaan lainnya, serta pemanfaatannya secara efektif dan efisien untuki kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keempat, **Hilma Meilani** dalam makalahnya: Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan setelah implementasi UU No.28 Tahun 2009 (Kasus di Kabupaten Badung, Bali) menunjukkan bahwa setelah implementasi UU No. 28 Tahun 2009 pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi kenaikan rasio efektivitas pajak dengan kecenderungan fluktuatif, namun tetap dalam katagori sangat baik. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Badung (2008-2015) memiliki katagori sangat baik, dengan nilai kontribusi diatas 50,0 persen. Setelah implementasi UU ini nilai kontribusinya terhadap PAD lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 86,9 persen. Antisipasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah meningkatkan kinerja keuangan, perluasan potensi sumber pendapatan, peningkatan intensifikasi pajak daerah, pengembangan ekstensifikasi pajak, dan mengoptimalkan sosialisasi UU dan peraturan pajak kepada masyarakat wajib pajak.

Tujuan Sub-Tema III adalah pemantapan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dalam rangka mendorong perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta peningkatan daya saing industri. Sub-Tema ini didukung oleh dua makalah, *Pertama*, Kebijakan dan regulasi persaingan usaha: Perilaku antipersaingan dan peran lembaga pengawas, oleh **Dewi Restu Mangeswuri**. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa peningkatan daya saing membutuhkan lingkungan persaingan usaha yang sehat, sehingga eksistensi otoritas persaingan menjadi sangat menentukan. Pemerintah dinilai telah memiliki basis regulasi dan perangkat hukum yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Basis regulasinya adalah UU No.5 Tahun 1999 dan perangkat hukum terkait dengan pengaturan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam konteks ini kebijakan diarahkan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, efisien, dan kompetitif, sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi UMKM dan usaha skala besar dalam proses produksi, pengembangan produk, dan pemasaran komoditas, barang dan jasa.

Makalah pendukung *Kedua*, ditulis oleh **Juli Panglima Saragih** dengan judul, Ekonomi ketenagakerjaan nasional: Isu aktual dan strategi pengembangan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja. Dinyatakan bahwa permasalahan ketenagakerjaan mencakup persolan tingkat upah, kompetensi tenaga kerja, dan pengangguran angkatan kerja. Kritik terhadap kebijakan upah minimum adalah ketidaksesuaian tingkat upah dengan kondisi perekonomian daerah, bahkan sebagian daerah hanya sanggup membayar 75 persen dari upah minimum. Sebagian besar tenaga kerja di berbagai sektor di dalam negeri tidak memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, sehingga sertifikasi profesi dinilai penting dan mendesak untuk dilakukan. Kebijakan sertifikasi profesi dinilai strategis untuk memperoleh kompetensi spesifik dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja dan ekonomi sektoral. Terkait dengan masalah pengangguran, khususnya pengangguran berpendidikan tinggi, perlu terus ditingkatkan jumlah tenaga kerja terdidik kejuruan (SMK dan Diploma) yang dinilai siap masuk bursa tenaga kerja, khususnya untuk sektor ekonomi formal.

Pada akhirnya dibutuhkan optimalisasi dan harmonisasi dari ketiga aspek strategis diatas dalam perumusan kebijakan terkait dengan percepatan pengembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah untuk mencapai pemerataan perekonomian nasional yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Jakarta, September 2017

Editor

INDEKS

A

Administrasi 77, 79, 86, 87, 89, 107, 122, 138, 139, 140

Akuntabilitas 64, 67, 78, 87, 104, 113, 120, 166

Amandemen 31

Anggaran 57, 66, 72, 110, 127, 134, 139, 144, 159, 179, 206

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 57

Antipersaingan 1, 164, 170, 171, 204

APBD 29, 48, 57, 66, 72, 103, 112, 113, 114, 129, 130, 135, 144, 159

B

Barang dan jasa 32, 59, 145, 173, 205

Belanja Daerah 57, 133

Belanja modal 136

Birokrasi 194

D

Daerah 16, 21, 56, 82, 98, 102, 126, 130, 142

Daerah otonom 3, 127

Dalam negeri 4, 37, 38, 71, 85, 93, 173, 199, 205, 210

Data 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 39, 50, 85, 118, 119, 126, 130, 132,
135, 144, 152, 159, 160, 164, 173, 174, 177, 183, 189, 192, 200,
203, 208, 209

Daya saing 4, 38, 52, 56, 66, 70, 71, 106, 164, 172, 173, 182, 186, 194,
195, 199, 204

Desentralisasi Fiskal 1, 102, 106, 112, 123, 128, 133, 134, 138, 139, 201,

E

Efektivitas 75, 79, 101, 124, 148, 149, 154, 155, 204, 207, 209

Efektivitas pajak daerah 1, 4, 143, 144, 149, 155, 158, 203

Ekstensifikasi 85, 155, 159, 204

F

Fiskal 1, 102, 106, 112, 123, 128, 133, 134, 138, 139, 140, 201, 209

H

Hukum 10, 15, 24, 48, 87, 89, 96, 128, 139, 164, 166, 167, 170, 173, 174, 179

I

Iklim usaha 4, 43, 162, 164, 173, 204

Implementasi Undang-undang 173

Indeks Gini 36

Indeks Produksi 44

Industri 1, 7, 10, 60, 80, 187, 200

Inovasi 8, 38, 157, 159, 171

Intensifikasi 104, 117, 119, 155, 159, 204

Investasi 54, 112, 160, 162, 165, 174, 196, 209

Investor 164, 165, 191, 192

J

Jenis pajak daerah 108, 115, 152

K

Kabupaten 3, 32, 48, 65, 66, 70, 71, 74, 99, 100, 101, 106, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 143, 144, 150, 151, 156, 165, 181, 191, 199, 203, 204

Kapasitas fiskal 128, 143

Kartel 166, 170, 171

Kebijakan 1, 2, 3, 4, 8, 27, 28, 32, 52, 53, 57, 58, 61, 63, 78, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 112, 116, 120, 126, 128, 130, 142, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 175, 178, 180, 190, 192, 195, 199, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212

- Kemandirian ekonomi 44
- Kemandirian fiskal 131, 150
- Keuangan 98, 109, 126, 130, 133
- Keuangan Daerah 29, 50, 107, 122, 127, 130, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 144, 148, 149, 159, 160, 209
- Kewenangan 100, 106, 110
- Kewirausahaan 37, 39, 40, 191
- Kompetitif 4, 191, 204
- Kondisi politik 32
- Konsepsi 30, 38, 46, 74
- Konsumsi 14, 33, 77
- Kontribusi pajak daerah 3, 102, 143, 144, 148, 149, 156, 157, 158, 204
- Kota 18, 25, 31, 49, 54, 71, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 146, 203, 209, 210
- KPPU 162, 166, 167, 171, 172, 173, 174
- Kredit 8, 17, 18, 19, 25, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 55, 206
- L
- Lembaga 12, 13, 24, 47, 52, 167, 171, 174, 180, 190, 194, 209
- Lembaga Pengawas 171, 209
- Lembaga Penjaminan 47, 49, 51, 52, 54, 202
- Lembaga Penjaminan Kredit 47, 49, 51, 54
- M
- Menengah 38, 39, 45, 54, 55, 56, 65, 72, 75, 80, 165, 173, 206
- Mikro 18, 25, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 54, 55, 72, 167, 173, 206, 210
- Modal 57, 61, 62, 80, 93, 166, 174
- Monopoli 4, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 204
- Moral hazard 52, 53
- N
- Nasional 29, 34, 99, 102, 105, 123, 165, 173, 180, 188, 189, 191, 192, 206, 207

Negara 31, 55, 61, 62, 77, 79, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 107, 109, 122, 123, 130, 134, 138, 139, 140, 162, 163, 167, 174, 175, 203, 207, 208, 211

NJOP 118

O

Otonomi 3, 31, 35, 98, 104, 113, 119, 125, 126, 133, 156, 158

Otonomi Daerah 36, 54, 127, 128, 134, 139, 140, 207

Otoritas Jasa Keuangan 9, 11, 18, 19, 20, 25, 29

P

PAD 3, 98, 99, 101, 102, 103, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 131, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 158, 159, 204, 207, 208, 209, 211

Padat karya 36, 37, 177, 191

Pajak 82, 83, 85, 118, 142

Pajak Daerah 107, 149, 151, 155, 156

Pasar 93, 169

Pbb 101, 110, 124

PDB 27, 28, 33, 40, 55, 112

PDRB 32, 53, 102, 202

Pelaku usaha 10, 11, 16, 17, 23, 28, 39, 40, 46, 47, 48, 50, 70, 71, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173

Pembangunan 13, 16, 27, 68, 75, 77, 79, 80, 99, 102, 113, 138, 140, 165, 173, 207, 208, 211

Pembangunan ekonomi 11, 16, 30, 36, 38, 59, 74, 202

Pemberdayaan 1, 2, 16, 29, 43, 53, 54, 62, 66, 72, 73, 76, 202

Pembiayaan 28, 80, 207, 209

Pemda 3, 75, 104, 111, 119, 120, 121, 122, 202, 203

Pemerintah 102, 109

Pemerintah Daerah 99, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 127, 128, 129, 142, 145, 151, 209

Pemerintah Pusat 103, 105, 106, 109, 111, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 139, 142, 144, 145, 160

- Pemungutan 87, 90, 100, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 138, 142, 145, 151, 157, 159, 203
- Pendapatan Asli Daerah 101, 102, 106, 107, 113, 131, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 150, 159
- Pendapatan Daerah 102, 104, 113, 114, 117, 118, 123, 131, 143, 150, 151, 152, 153, 155, 156
- Penerimaan 84, 98, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 138, 139, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 186
- Penerimaan daerah 103, 104, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 130, 133, 136, 143, 150, 155, 156
- Pengalihan 99, 100, 104, 111, 116, 118, 119
- Pengeluaran 33, 35, 77, 87, 105, 107, 112, 145, 146
- Pengembangan 4, 18, 21, 25, 42, 45, 46, 53, 55, 75, 76, 79, 80, 99, 123, 165, 166, 191, 206
- Penjaminan Ulang 47
- Peraturan 45, 47, 61, 62, 65, 72, 80, 90, 93, 94, 97, 101, 111, 113, 116, 145, 160, 185, 200
- Peraturan Daerah 65, 72, 101, 116, 145
- Perda 29, 65, 72, 73, 93, 101, 102, 116, 121, 171, 174, 193, 207
- Perdesaan 111, 118, 141, 147, 158
- Perekonomian 1, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 47, 54, 71, 163, 185, 201, 206, 207
- Perekonomian Indonesia 23, 27, 28, 31, 32, 34, 56
- Perekonomian Nasional 30, 32, 37, 206, 207
- Perijinan 43, 164, 165, 166
- Perimbangan Keuangan 102, 106, 123, 125, 126, 128, 143, 144, 145, 159, 160, 209
- Perimbangan keuangan 102, 125
- Perjanjian 146, 168, 169, 188
- perkotaan 3, 35, 99, 100, 109, 110, 111, 154, 185, 191
- Persaingan 1, 164, 166, 167, 170, 171, 173, 174, 175, 201, 206, 209, 210

Persaingan Usaha 1, 164, 166, 167, 171, 173, 174, 175, 201, 206, 209, 210

Perusahaan penjaminan 52

Pesaing 51, 169, 170, 171

Potensi pajak daerah 151, 155, 157, 159

Produksi 17, 23, 30, 31, 43, 70, 163, 167, 168, 169, 184

Produktivitas 4, 35, 37, 72, 73, 77, 137, 177, 185, 186, 191, 196, 198, 205

Produsen 167

Provinsi 3, 18, 29, 40, 41, 43, 58, 65, 66, 72, 78, 99, 106, 116, 133, 138, 172, 181, 182, 184

PTSP 165, 166

Pusat 6, 28, 55, 83, 98, 103, 105, 106, 109, 111, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 131, 139, 141, 142, 144, 145, 159, 160, 162, 173, 174, 177, 184, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 211

R

Rasio efektivitas 144, 155, 158, 204

Realisasi 37, 109, 113, 114, 115, 150, 152, 153, 154

Realisasi pajak daerah 149, 151, 152, 156, 158

Reformasi 3, 31, 32, 54, 84, 87, 95

Regulasi 64, 72, 120, 164, 165, 166

Retribusi 3, 99, 103, 104, 118, 130, 141, 142, 145, 150, 151

S

Skala usaha 39, 53, 202

T

Target Pajak Daerah 115, 155

Tingkat ketergantungan daerah 158

transaksi 8, 11, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 43, 48, 53, 83, 86, 169, 201, 202

U

UMKM 27, 37, 39, 54, 55, 80

Undang-undang 31, 62, 95, 107, 142, 145, 146, 147, 151, 159, 160, 167, 168, 170, 171, 173, 200, 204, 208

Unfair 170

Usaha kecil 17, 39, 40, 45, 46, 50, 62, 76, 164, 176

Usaha menengah 45, 50

Usaha Mikro 18, 25, 38, 39, 41, 42, 45, 54, 55, 72, 206

Usaha mikro 28, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 71, 73, 74, 78

UU 39, 55

UUD 1945 30, 167

W

Wajib pajak 3, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 102, 107,
116, 117, 118, 121, 157, 159, 203, 204

BIOGRAFI PENULIS

Sony Hendra Permana, penulis adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Prospek Pelaksanaan Redenominasi di Indonesia”, “Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM”, dan “Persaingan Usaha Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.

Ariesy Tri Mauleny lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Penulis adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Menyelesaikan Sarjana Sains di FMIPA Universitas Indonesia tahun 1997 dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, kekhususan Keuangan Pusat dan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 2007. Berkarir sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2010 hingga sekarang. Penulis pernah mendampingi Komisi XI untuk pembahasan RUU PNBP (2016) dan Baleg untuk pembahasan RUU Penjaminan (2015) serta Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Aglomerasi,

Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015), Peranan Dana Perimbangan terhadap Sektor Kesehatan (2014), dan Eksistensi Keuangan Negara Menuju Kemandirian Pembangunan di Era Otonomi Daerah (2013). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), Evaluasi Pembangunan Daerah (2014); Efektivitas Dana Perimbangan (2013); dan Pembiayaan Perumahan Rakyat (2012). Penulis dapat dihubungi melalui email: ariesy.t.leny@gmail.com atau ariesy.t.leny@dpr.go.id.

Achmad Sani Alhusain lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, tahun 1998. Menyelesaikan *Master of Art in Economic Policy di Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA*, 2002. Penulis merupakan Peneliti Madya Golongan IV/a dengan bidang kepakaran Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tulisan yang sudah diterbitkan antara lain berjudul: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif, Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia, dan Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan dan Solusi. Penulis juga aktif melakukan berbagai penelitian, pengkajian, dan analisa yang berhubungan dengan isu-isu kebijakan publik serta memberikan pendampingan pada Alat Kelengkapan Dewan dan dalam proses pembentukan Undang-undang yang sesuai dengan bidang kepakaran. Email: sani_alhusain@yahoo.com.

Lisnawati adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Badan Keahlian DPR RI. Penulis pernah mendampingi Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya

dengan topik: PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). Penulis dapat dihubungi melalui email:lisnawati.dpr@gmail.com.

Mandala Harefa, adalah peneliti Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI sejak tahun 1995, yang merupakan alumnus Program Pascasarjana, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Penulis pada saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik bidang ekonomi regional yang bertugas memberi dukungan kegiatan DPR dalam membuat kajian, analisa kebijakan, proses RUU menjadi undang-undang dan mempersiapkan makalah bagi Ketua dan Anggota DPR RI. Sebagai peneliti telah melakukan berbagai penelitian lapangan dan telah diterbitkan di jurnal ilmiah dan dalam bentuk buku yang topiknya berkaitan dengan permasalahan ekonomi publik sesuai dengan fungsi kedewanan antara lain keuangan Negara dan Daerah, ekonomi Regional dan topik lainnya terkait dengan ekonomi public BUMN dan UMKM yang telah

Ari Mulianta Ginting adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Moneter. Tahun 2017 memulai kuliah Doktor Ilmu Ekonomi dengan Konsentrasi *Public Policy* di Universitas Trisakti. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Kebijakan Ekonomi pada Pusat Penelitian. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer sejak tahun 2008 hingga sekarang untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail : ari.ginting@dpr.go.id.

Hilma Meilani, adalah Peneliti Muda dengan kepakaran Ekonomi Terapan. Lahir di Kudus, 8 Mei 1977. Pendidikan S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 *Finance* di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2009 hingga sekarang. Penulis telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Rasio Efektivitas dan Kontribusi PAD terhadap Belanja dan Investasi Daerah (2016), Peran Kebijakan Persaingan Usaha untuk Meningkatkan Efisiensi menghadapi AEC (2015), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah (2014), dan Desentralisasi Fiskal dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (2013). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: Pajak Daerah (2016), Tantangan dan Peluang Pemerintah Daerah dalam Menarik Investasi (2015), Kebijakan Persaingan Usaha (2014), dan Efektivitas Dana Perimbangan (2013). Penulis dapat dihubungi melalui email: hilma.meilani@dpr.go.id.

Dewi Restu Mangeswuri., Lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan studi Sarjana dan Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta jurusan Akuntansi. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Kandidat Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini adalah Kandidat Peneliti dengan pangkat/ golongan Penata Muda Tingkat I (Golongan III/c). Pernah ditugaskan sebagai Tim Pemantauan Pelaksanaan UU di DPR RI untuk memantau UU tentang Perindustrian dan UU tentang Undian, serta bersama dengan Tim Pengawasan Internal dan BURT menyusun draft Mekanisme Pengawasan di DPR RI. KTI yang pernah dipublikasikan terkait kepakaran yaitu: Kebijakan Pembiayaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (Jurnal, 2016), Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha (Buku Tim, 2015), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar) (Buku Tim, 2014), Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam (Jurnal, 2012). Tugas terkait penyusunan Undang-Undang adalah tergabung dalam tim kerja penyusunan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Saat ini masih menyelesaikan Naskah Akademik dalam

rangka penyusunan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulis dapat dihubungi melalui email: mangeswuri@yahoo.com.

Juli Panglima Saragih, lahir di Kota Tebingtinggi, Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 1964. Telah menikah dan memiliki satu anak. Saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil Golongan IVC dengan jabatan Peneliti Madya Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pendidikan formal yang sudah ditempuh adalah Sarjana (S1) dari FISIP Universitas Negeri Padjadjaran Bandung Tahun 1988. Pascasarjana (S2) Magister Manajemen (MM) dari Universitas Nusantara Jakarta, tahun 1999. Penulis juga aktif menulis di jurnal, surat kabar nasional, dan daerah, dan beberapa majalah dalam negeri seperti Majalah Parlemenaria-Setjen DPR RI. Menulis buku tentang: 'Desentralisasi fiskal ...' yang diterbitkan oleh Penerbit Ghalia Indonesia (GI), Jakarta, April 2003. Aktif melakukan penelitian di dalam negeri, dan mengikuti berbagai seminar tentang ekonomi dan kebijakan publik yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Peneliti dan FGD keparlemen. Anggota Tim Asistensi RUU, seperti: RUU tentang Anti Monopoli, RUU tentang Perlindungan Konsumen, RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; RUU tentang Perkoperasian; RUU tentang Perindustrian; RUU tentang lembaga Keuangan Mikro; dan RUU tentang Perasuransian. Melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka studi komparasi/perbandingan dan mengikuti *training* tentang keparlemenan seperti ke Amerika Serikat (2000 dan 2008), Australia (2006), India (2004), Philippina, Thailand, dan Vietnam (1999), Canada (2004). Saat ini (2017) ikut serta dalam Tim Penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. Alamat email: julipsaragih@gmail.com.

BIOGRAFI EDITOR

I Wayan Rusastra lahir di Denpasar, 31 Desember 1951. Ia menyelesaikan pendidikan *Ph.D Agricultural Economics* dari Universitas Filipina di Los Banos (UPLB) tahun 1995. Dalam perkembangan karirnya selama 37 tahun (1979-2016) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), ia ditetapkan sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) pada tahun 2001 (Keppres RI No.68/M/2002). Pada 30 Desember 2010 ia dikukuhkan sebagai Profesor Riset Agroekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan orasi: Reorientasi Paradigma Pengentasan Kemiskinan dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi Global. Orasi purna bakti dilakukan Desember 2016 dengan judul, SDG dan Nawacita: Implikasinya terhadap Penelitian dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Dalam perjalanan karirnya ia menerbitkan tidak kurang dari 150 karya tulis ilmiah (KTI), sebagai editor 35 buku/prosiding, Ketua Dewan Redaksi 3 jurnal ilmiah, yaitu Forum Agro Ekonomi (FAE), Jurnal Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (JPPTP), dan Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian (JAKP), serta sebagai Anggota Dewan Redaksi dan Mitra Bestari 10 jurnal ilmiah lainnya. Suatu kehormatan baginya sebagai Editor tunggal 10 buku unggulan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dan Editor 13 buku/prosiding unggulan di PSEKP dengan lembaga mitra (nasional dan internasional) seperti IAARD Press/Balitbangtan, Puslitbangnak, DPP Perhepi, ACIAR, UNESCAP-CAPSA, APEC, dan FAO. Penugasan yang sempat diemban di antaranya adalah sebagai Kepala Bidang Publikasi dan Kerjasama Penelitian PSEKP, Deputi Direktur R&D UNESCAP-CAPSA, Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3)-LIPI, Widyaiswara Luar Biasa Pusbindiklat-LIPI, Tim Penilai naskah orasi Profesor Riset di PSEKP dan LIPI, Sekretaris Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional, serta pembimbing dan promotor program doktor di IPB, UNPAD, dan UGM. Atas pengabdianya dalam penelitian dan pengembangan iptek bidang agroekonomi

dan kebijakan pembangunan ia dianugerahi penghargaan: Ahli Peneliti Utama (APU) Berprestasi dari Menteri Pertanian (2002), Satyalancana Karya Satya X Tahun (1998), Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2004), dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2015) dari Presiden Republik Indonesia. Ia dapat dihubungi melalui email: wrusastra@yahoo.com.

